



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke-	: 6
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 25 Januari 2021
Waktu	: Pukul 10.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Meminta masukan terhadap Calon Anggota Ombudsman RI Periode 2021-2026.
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 37 (tiga puluh tujuh) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) C. Ketua LSM Pemerhati Pelayanan Publik

**I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Ketua LSM Pemerhati Pelayanan Publik, dengan agenda meminta masukan terhadap Calon Anggota Ombudsman RI Periode 2021-2026, hari Senin, 25 Januari 2021, dibuka pukul 10.35 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pokok-pokok pembahasan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Ketua LSM Pemerhati Pelayanan Publik, dengan agenda meminta masukan terhadap Calon Anggota Ombudsman RI Periode 2021-2026, yaitu:

1. Ketua YLKI menyampaikan sebagai berikut:
  - a. Potret pelayanan publik di Indonesia, terkhusus yang dikelola birokrasi secara murni masih banyak menyisakan persoalan mendasar;
  - b. Kehadiran dan keberadaan ORI sangat penting untuk mendorong terwujudnya pelayanan publik yang handal, transparan dan akuntabel;
  - c. Diperlukan kelembagaan ORI dan personal komisioner ORI yang profesional, kapabel dan independen;
  - d. Diperlukan keberpihakan negara yang lebih serius pada keberadaan ORI;
  - e. Diperlukan sinergi kuat antara ORI dengan lembaga sejenis, baik lembaga negara dan atau CSO.
  
2. Ketua MPPP menyampaikan usulan figur Anggota ORI, sebagai berikut:
  - a. Memiliki integritas dan independensi yang kuat.
  - b. Memiliki kematangan dan kepemimpinan yang mengutamakan hasil bukan eksistensi individu.
  - c. Memiliki dan mewakili keahlian di 7 sektor sebagaimana pembagian kerja di dalam struktur Ombudsman RI.
  - d. Mewakili kompetensi bukan representasi golongan atau kelompok.
  - e. Memiliki jaringan luas dengan stakeholder strategis.
  - f. Memiliki kemampuan yang kuat didalam mempengaruhi penyelenggara layanan untuk melakukan tindakan korektif.
  - g. Mampu menjaga keberlangsungan (keberlanjutan) perbaikan kelembagaan Ombudsman.
  - h. Memiliki keberpihakan dan pembelaan terhadap kelompok minoritas yang selama termarginalkan dalam pelayanan publik.

## III. CATATAN RAPAT

Catatan Rapat pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Ketua LSM Pemerhati Pelayanan Publik, dengan agenda meminta masukan terhadap Calon Anggota Ombudsman RI Periode 2021-2026, sebagai berikut:

1. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Ketua LSM Pemerhati Pelayanan Publik (MPPP) memberikan saran dan masukan terhadap Ombudsman RI (ORI) secara kelembagaan serta masukan kepada para Calon Anggota ORI 2021-2026 yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM dan kinerja ORI ke depan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
2. Saran dan masukan dari YLKI dan MPPP dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pemilihan Calon Anggota ORI 2021-2026.

#### IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.55 WIB.

Jakarta, 25 Januari 2021

KETUA RAPAT



H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG  
A-270